

Literasi Kritis Pustakawan Perguruan Tinggi dalam Menavigasi Informasi Sosial-Politik di Era *Post-Truth*

Nurul Farida^{1*}, I Ketut Gede Harsana², Mifta Olievia Wardhani³, Ni Made Lila Sri Kamala⁴

^{1,2,3,4}Program Studi D3 Perpustakaan, Universitas Udayana

*Email: farida.nurul@unud.ac.id

ABSTRACT

Librarians, as information professionals, perform two types of work: technical and analytical. One analytical task inherent to academic librarians is running literacy programs to help students understand information accurately. The definition of literacy continues to evolve, from mere literacy skills into a social practice involving values, attitudes, and power relations. In the post-truth era, marked by the rapid flow of digital information, disinformation, and content generated by generative artificial intelligence, critical literacy has become an urgent competency for librarians as literacy advocates, enabling them to question the power relations, discourses, and identities embedded within information before passing it on to users. This study aims to describe the critical literacy competence of academic librarians in Semarang in responding to information containing socio-political issues, using a four-dimensional critical literacy framework: disrupting the commonplace, interrogating multiple viewpoints, focusing on sociopolitical issues, and taking action. The study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and literature review of two purposively selected academic librarian informants. The results show that librarians read information from multiple perspectives, recognize that information is produced by individuals with particular interests despite being nominally neutral, and remain alert to opinion-shaping tendencies. This critical understanding is then acted upon through discussion and shared within literacy programs, in line with the SDG 2030 agenda on quality education.

Keywords: *Critical Literacy; Academic Librarian; Socio-Political Information; Post-Truth; Indonesia*

ABSTRAK

Pustakawan sebagai profesional informasi memiliki dua jenis pekerjaan, yakni teknis dan analitis. Salah satu pekerjaan analitis yang melekat pada pustakawan perguruan tinggi adalah menjalankan program literasi untuk membantu mahasiswa memahami informasi secara tepat. Definisi literasi terus berkembang, dari sekadar kemampuan melek huruf menjadi praktik sosial yang melibatkan nilai, sikap, dan relasi kekuasaan. Pada era post-truth yang ditandai derasnya arus informasi digital, disinformasi, dan konten hasil kecerdasan buatan generatif, literasi kritis menjadi kompetensi mendesak bagi pustakawan sebagai penggerak literasi, agar mampu mempertanyakan relasi kekuasaan, wacana, dan identitas yang tersemat dalam informasi sebelum diteruskan kepada pengguna. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan literasi kritis pustakawan perguruan tinggi di Semarang dalam menyikapi informasi bermuatan isu sosial-politik, menggunakan kerangka empat dimensi literasi kritis: disrupting the commonplace, interrogating multiple viewpoints, focusing on sociopolitical issues, dan taking action. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka terhadap dua informan pustakawan akademik yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pustakawan membaca informasi dari berbagai sudut pandang, menyadari informasi diproduksi oleh individu dengan kepentingan tertentu meski secara prinsip bersifat netral, serta waspada terhadap penggiringan opini. Pemahaman kritis ini ditindaklanjuti melalui diskusi dan dibagikan kembali dalam program literasi, sejalan dengan agenda SDGs 2030 bidang pendidikan berkualitas.

KATA KUNCI: literasi kritis; pustakawan perguruan tinggi; informasi sosial-politik; post-truth; Indonesia

1. PENDAHULUAN

Informasi merupakan hal yang netral, tetapi penulis informasi memiliki pemahaman, sikap, dan nilai dalam menuliskan suatu informasi. Memahami informasi tidak semudah yang dibayangkan, karena setiap informasi yang diproduksi mengandung wacana yang sengaja dibentuk sebagai usaha untuk mempersuasi pembaca. Namun setiap pembaca dapat mendefinisikan kembali informasi yang diterima untuk dapat melihat ketidaknetralan yang ada dalam sebuah informasi.

Literasi kritis menekankan hubungan antara teks, pembuatan makna, dan kekuasaan untuk melakukan tindakan sosial transformatif yang berkontribusi pada pencapaian tatanan sosial yang lebih adil (Thevenin, 2022). Kemampuan literasi kritis digunakan untuk memahami posisi subjektif individu dalam memahami dunia dan bagaimana cara bertindak di dalamnya. Literasi kritis menganut pandangan sosiokultural tentang bahasa dan pendidikan literasi, di mana pembelajaran tidak dipahami sebagai sesuatu yang statis, tetapi sebagai suatu proses dinamis yang dipengaruhi oleh faktor sosial (Weng, 2023).

Urgensi literasi kritis semakin nyata memasuki pertengahan dekade 2020-an. Di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, industri pelatihan dan program literasi yang dirancang khusus untuk kesiapan kerja terus tumbuh. Di Indonesia, Kepala Perpustakaan Nasional pernah menegaskan bahwa literasi merupakan alat kecakapan hidup sebagai modal penting untuk bersaing, mencakup kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemauan kolaboratif (Indriani, 2020). Sejak pernyataan tersebut disampaikan, lanskap informasi berubah jauh lebih cepat: maraknya disinformasi politik, polarisasi opini di media sosial, dan derasnya konten hasil kecerdasan buatan generatif yang dapat diproduksi tanpa melalui proses verifikasi maupun tinjauan editorial. Kondisi inilah yang menegaskan bahwa pustakawan kini benar-benar berada di tengah era *post-truth*, ketika validitas sebuah informasi kerap kalah bersaing dengan daya tarik emosional, keberpihakan, dan kecepatan sebarannya. Kajian tinjauan literatur terbaru mencatat bahwa literasi kritis terus berkembang sebagai respons atas

populisme, polarisasi, dan teknologi generatif yang berpotensi mengaburkan batas antara informasi yang diverifikasi dan yang tidak (Tewell, 2025). Pustakawan akademik di berbagai negara pun mulai didorong untuk mengembangkan literasi kritis agar mampu membimbing sivitas akademika menilai keluaran alat generatif secara reflektif, bukan menerimanya begitu saja sebagai kebenaran (Zhang, Wang, Ye, & Khamo, 2025).

Literasi kritis menjadi sebuah kemampuan yang harus dimiliki setiap individu, termasuk para pustakawan sebagai profesional informasi. Dikatakan sebagai profesional informasi karena pustakawan merupakan sebuah pekerjaan yang bergerak di bidang pelayanan informasi. Pustakawan sebagai profesional informasi mempunyai beragam pekerjaan yang terdiri dari dua jenis, yaitu teknis dan analitis. Pekerjaan yang bersifat analitis, seperti kegiatan penelitian atau kegiatan lain untuk pengembangan perpustakaan, termasuk pengembangan profesi. Dalam ranah perpustakaan perguruan tinggi, pustakawan mempunyai program literasi sebagai salah satu pekerjaan pustakawan. Pustakawan memberikan pembelajaran literasi dalam berbagai kegiatan khusus untuk membantu mahasiswa dalam pembelajaran literasi. Tujuan dari program literasi adalah upaya untuk menciptakan peserta didik yang melek terhadap informasi dan bagaimana cara menerima informasi dengan tepat.

Fungsi literasi kritis untuk profesional informasi bukan hanya untuk kemampuan pribadi, melainkan dapat dijadikan sebagai pendekatan dalam menjalankan program literasi kepada pengguna. Literasi kritis merupakan pendekatan yang dapat melibatkan pengguna dalam bentuk membaca yang lebih aktif dan cara yang lebih kreatif untuk mengkritik teks, serta membekali mereka dengan keterampilan dan strategi untuk mempertanyakan sistem sosial dan politik (Wickline, 2017). Dalam hal ini, profesional informasi berperan sebagai penengah kredibilitas atau otoritas informasi, dan menilai bahwa literasi kritis penting sebagai pendekatan dalam melakukan praktik informasi, pengambilan keputusan, dan mengembangkan pengetahuan.

Secara praktik, literasi kritis memberikan kesadaran pada individu untuk menjadi lebih peka terhadap ketidakadilan sosial melalui teks. Literasi kritis menghormati dan mempertahankan perbedaan budaya untuk memahami isu-isu dari perspektif global dan multikultural (Liu, 2017). Oleh karena itu, melalui kemampuan literasi kritis, para pustakawan akademik diharapkan dapat menjadi individu yang dapat bersikap bijak dan memberikan manfaat dalam pekerjaannya, terutama dalam menjalankan perannya sebagai penggiat literasi untuk para mahasiswa. Pustakawan harus menjadi konsumen informasi secara efektif, mampu mendapatkan informasi secara tepat untuk segala kebutuhan dalam kehidupan pribadi maupun profesi mereka. Literasi kritis merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk membuat seseorang menjadi sebuah generasi yang demokratis, kritis akan informasi, sadar akan keadilan sosial, dan berkomitmen untuk mengubah konflik yang ada menjadi sebuah perdamaian dalam kehidupan sosial (Adunyarittigun, 2017).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji kemampuan literasi kritis pustakawan akademik di Semarang, dengan menempatkan isu sosial-politik sebagai lensa utama karena isu tersebut dinilai paling rentan memuat relasi kekuasaan dan kepentingan yang tersembunyi dalam sebuah informasi, terutama di tengah derasnya arus informasi pada era *post-truth* yang menuntut pustakawan untuk mampu memilah, menilai, dan menyikapi informasi tersebut secara reflektif sebelum diteruskan kepada pengguna. Pendekatan literasi kritis digunakan untuk melihat respon dan pemahaman informan ketika dihadapkan pada isu sosial yang berkaitan dengan pekerjaan kepustakawanan maupun kehidupan sehari-hari, dengan menggunakan empat dimensi literasi kritis yang dirumuskan Lewison, Flint, dan Sluys: *disrupting the commonplace, interrogating multiple viewpoints, focusing on sociopolitical issue, and taking action*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana literasi kritis dipraktikkan secara nyata oleh pustakawan akademik.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Dimensi Literasi Kritis

Literasi kritis merupakan sebuah pendekatan yang menekankan hubungan antara teks, pembuatan makna, dan kekuasaan untuk mendorong tindakan sosial transformatif menuju tatanan yang lebih adil (Thevenin, 2022). Penelitian ini merujuk pada empat dimensi literasi kritis, yakni: *disrupting the commonplace, interrogating multiple viewpoints, focusing on sociopolitical issues, serta taking action and promoting social justice*.

2.1.1 Mengganggu (Asumsi) yang Lumrah (*Disrupting the Commonplace*)

Literasi kritis dikonseptualisasikan untuk melihat kehidupan “sehari-hari” melalui perspektif baru. Menurut Arvianti, Fitriati, and Mujiyanto (2023) Literasi kritis mempertanyakan kembali kebenaran umum yang diyakini oleh masyarakat. Literasi Kritis mempermasalahkan semua kebenaran dan memahami sebuah pengetahuan sebagai produk sejarah.

Pada dimensi ini, Literasi kritis lebih mengarah pada bagaimana seorang pembaca dapat meneliti atau memahami bahasa dalam teks sebagai sebuah produk yang dihasilkan oleh peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, sehingga pembaca diarahkan untuk memahami teks berdasarkan latar belakang teks tersebut bisa terbentuk. Literasi kritis mendorong pembaca untuk dapat memahami suatu peristiwa yang terjadi melalui perspektif baru. Lee (2019) menyatakan bahwa literasi kritis telah menunjukkan bahwa literasi dapat digunakan untuk memanfaatkan informasi pada masa kini, dengan cara menguntungkan sebuah kelompok tertentu yang ingin menghancurkan atau mengalahkan kelompok yang lainnya. Bahasa dalam sebuah teks akan berusaha menggiring pembaca untuk menempatkan atau memposisikan seorang pembaca sesuai dengan keinginan penulis teks, maka dalam memahami suatu teks hasulah dengan mencoba merubah posisi dalam melihat suatu bahasa dalam teks. Menurut Kuo (2023), untuk dapat menilai sesuatu yang biasa dengan perspektif baru dapat dilakukan dengan mengubah rutinitas,

kebiasaan, keyakinan, atau teori yang sudah biasa dilakukan. Salah satu caranya adalah dengan meneliti teks yang ada dikaitkan dengan hal-hal yang baru, bisa saja dengan teks lain yang berkaitan, seperti berita dalam majalah, koran, televisi, maupun internet, serta menentukan bagaimana teks yang di baca dapat mendikte persepsi dan keyakinan orang lain.

2.1.2 Memeriksa berbagai Sudut Pandang (*Interrogating Multiple Viewpoints*)

Literasi kritis meminta pembaca untuk memposisikan diri untuk memahami informasi yang terkandung dalam teks tidak hanya dari satu sudut pandang saja, selain berdasarkan sudut pandang pribadi juga diperlukan dari sudut pandang orang lain, atau bahkan dari sudut pandang penulis lain yang menuliskan teks serupa. Hal ini akan membuat seorang pembaca menjadi lebih bijak dalam menanggapi isi informasi dalam teks tersebut. menurut Lee (2019) bahwa berkaca pada banyak hal dan kontradiktif sangatlah penting untuk melihat suatu perbedaan. Dengan melihat suatu permasalahan dari sudut pandang pihak lain, mampu membuat pembaca dapat melihat suatu perbedaan dan memahami suara dari pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Menurut McLaughlin & DeVoogd, bahwa prinsip-prinsip literasi kritis, seperti melihat suatu teks dari berbagai sudut pandang dapat membantu pembaca untuk dapat memahami apa arti dan bagaimana fungsi dari literasi kritis (Hidayat, Gustine, and Setyarini, 2020). Dalam hal ini adalah proses dinamis yang menguji hubungan, memperluas pemikiran pembaca, ketika membaca kata dan dunia saat pembaca membaca dengan kritis. Dengan melakukan apresiasi serta eksplorasi perspektif-perspektif lainnya dapat membuat seorang pembaca melihat situasi-situasi yang ada dalam suatu teks dari berbagai sudut pandang.

2.1.3 Fokus pada Isu Sosial Politik (*Focusing on Sociopolitical Issues*)

Isu sosialpolitik merupakan hal yang penting, mengingat sifat literasi dan bagaimana literasi itu di bangun. Salah satu strategi untuk mempertanyakan dinamika kekuasaan adalah dengan membaca literatur kritis (Arvianti,

Fitriati and Mujiyanto, 2023). Literasi bukanlah sesuatu yang netral, biasanya telah terkonstruksi secara sosial dan politik untuk mencapai suatu kepentingan tertentu (Lee, 2019). Setiap teks yang diciptakan pasti memiliki nilai historis dan mengandung ideologi tertentu yang dituangkan oleh pencipta teks tersebut. Teks dengan sengaja diciptakan untuk menggiring opini dan mengubah struktur kognitif pembacanya. Pemilihan bahasa dalam membangun suatu teks secara keseluruhan, bisa saja dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkuasa pada saat teks tersebut dibuat. Menurut McLaren, literasi bukan sekedar ideologis dan sosial, tapi juga plural atau keberagaman dan politis (Provenzo and Apple, 2015). Maka dari itu, literasi kritis digunakan untuk memeriksa teks untuk mengidentifikasi dan menantang konstruksi sosial, mendasari berbagai asumsi dan ideologi, serta struktur kekuatan yang secara sengaja maupun tidak sengaja menciptakan sebuah ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial yang terkandung dalam teks (Reece and Rish, 2020). Sehingga dalam memahami teks, pembaca dapat memfokuskan diri pada isu sosialpolitik yang sedang terjadi, hal ini bertujuan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan informasi yang terkandung dalam teks yang menyebar.

2.1.4 Mengambil Tindakan (*Taking Action and Promoting Social Justice*)

Dimensi ini sering dianggap sebagai definisi literasi kritis, akan tetapi untuk dapat melakukan aksi dan mempromosikan keadilan sosial, tentu saja tidak dapat dilakukan tanpa memahami tiga dimensi sebelumnya. Menurut Kuo (2023), bahwa seorang pembaca dapat mengambil bahasa atau tanda yang ada dalam sebuah teks untuk dapat diterapkan dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami bahasa dan tanda yang ada dalam teks dengan mendekati berbagai realitas yang ada dalam teks untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia, sehingga dapat bertindak secara bijaksana dan menciptakan keadilan sosial.

2.2 Pustakawan Akademik

Pustakawan akademik adalah tenaga profesional yang bekerja di perpustakaan perguruan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi, atau politeknik) dan bertugas mengelola, menyediakan, serta memfasilitasi akses terhadap sumber informasi dan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat serta perubahan pola perilaku pencarian informasi sivitas akademika, peran pustakawan akademik mengalami pergeseran signifikan. Pustakawan tidak lagi sekadar bertugas mengelola dan menyediakan koleksi bahan pustaka, tetapi juga dituntut berperan sebagai fasilitator literasi informasi, mitra riset, kurator data, hingga konsultan publikasi ilmiah (Royani dan Rahayu, 2020; Utomo dan Asaniyah, 2025).

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa peran pustakawan akademik telah meluas jauh melampaui fungsi tradisional sebagai pengelola koleksi. Djaenudin dan Tupan (2020) mencatat bahwa reorganisasi kelembagaan turut mendorong perluasan tugas pustakawan, termasuk keterlibatan dalam pengelolaan pengetahuan institusi. Sejalan dengan itu, kajian di lembaga penelitian dan akademik menemukan bahwa peran pustakawan bergeser menjadi informan riset, tenaga pengajar literasi informasi, penjaga arus informasi digital, evaluator sumber daya elektronik, sekaligus pengelola data penelitian (Royani dan Rahayu, 2020).

Literasi merupakan salah satu domain layanan yang paling konsisten disorot dalam literatur mengenai pustakawan akademik. Sistarina (2020) menunjukkan bahwa implementasi program literasi di Perpustakaan Universitas Airlangga menjadi upaya strategis dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Peran pustakawan dalam konteks ini tidak terbatas pada pengelola koleksi, melainkan juga berfungsi sebagai fasilitator, pendidik, dan navigator informasi yang membantu pengguna dalam mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan sumber daya digital secara kritis dan efektif.

2.3 Informasi Sosial-Politik, Relasi Kuasa, dan Era *Post-Truth*

Informasi sosial-politik dipandang sebagai jenis informasi yang paling erat kaitannya dengan relasi kuasa, karena penulis maupun media penyedia informasi cenderung menyisipkan kepentingan tertentu ke dalam narasi yang disampaikan. Literasi kritis, dalam konteks ini, menuntut individu untuk peka terhadap ketidakadilan sosial yang tersembunyi di balik teks, sekaligus menghormati keberagaman perspektif global dan multikultural (Liu, 2017). Selain menuntut kepekaan individu, literasi kritis berpotensi membentuk generasi yang demokratis, kritis terhadap informasi, dan berkomitmen mengubah konflik sosial menjadi perdamaian (Adunyarittigun, 2017).

Fleksibilitas penerapan literasi kritis ini juga tampak pada ragam isu yang dapat disasarnya, misalnya, menunjukkan bagaimana literasi kritis dapat digunakan untuk membangun kesadaran gender melalui buku bergambar, yang menegaskan bahwa kerangka empat dimensi bersifat lintas-isu dan tidak terbatas pada ranah politik semata (Kuo, 2023). Urgensi kepekaan semacam itu meningkat tajam memasuki era *post-truth*, yaitu kondisi ketika validitas sebuah informasi kerap kalah bersaing dengan daya tarik emosional dan keyakinan personal pembaca. Literasi informasi kritis terus berkembang sebagai respons atas populisme, polarisasi, dan teknologi generatif yang mengaburkan batas antara informasi terverifikasi dan tidak (Tewell, 2025).

2.4 Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian Ini

Kajian tentang literasi kritis selama ini lebih banyak berfokus pada konteks pendidikan formal daripada konteks profesional informasi. Farida (2021) meneliti kemampuan literasi kritis pada mahasiswa manajemen informasi perpustakaan, namun subjeknya adalah mahasiswa yang belum berperan sebagai praktisi. Hidayat, Gustine, & Setyani (2020) mendokumentasikan tantangan penerapan strategi literasi kritis dari sudut pandang

seorang guru bahasa Inggris di sekolah menengah, yang menegaskan bahwa penerapan literasi kritis di lapangan tidak selalu semulus konsep teoretisnya. Liu (2017) melakukan studi eksperimental tentang penerapan literasi kritis di kelas membaca bahasa Inggris (EFL) pada mahasiswa Tiongkok. Penelitian ini membahas tentang penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa dunia dipandang bukan sekadar alat pertukaran informasi, melainkan juga sarana yang memperkuat hierarki sosial dan merepresentasikan kepentingan sosial tertentu. Atas dasar itu, pengajar EFL dianggap perlu menanamkan kesadaran kritis agar mahasiswa mampu melawan ketidakadilan sosial dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai warga global.

Ketiga penelitian di atas tidak secara spesifik menyorot bagaimana subjek menavigasi informasi bermuatan isu sosial-politik di tengah derasnya disinformasi yang justru menjadi konteks paling mendesak saat ini bagi profesi informasi. Maka dari itu, dilakukan penelitian ini untuk menyorot pustakawan perguruan tinggi dalam ranah profesional informasi, yang secara spesifik dihadapkan pada informasi bermuatan isu sosial-politik di era post-truth. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mereplikasi topik yang sudah ada, tetapi memperluasnya ke subjek, konteks profesional, dan muatan informasi yang belum tersentuh oleh Farida (2021), Hidayat et al. (2020), maupun Liu (2017).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai pedoman untuk melakukan dan menentukan alur penelitian. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Anggito & Setiawan, 2018).

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, artinya pengambilan sampel didasarkan pada

pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti (Sugiyono, 2019). Kriteria sampel ditetapkan karena tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel penelitian, serta adanya keterbatasan peneliti untuk menjangkau keseluruhan populasi. Kriteria yang ditetapkan adalah: (1) berprofesi sebagai pustakawan akademik di Semarang, dan (2) memiliki pemahaman tentang literasi kritis. Berdasarkan kriteria tersebut, dipilih dua informan untuk mendapatkan data penelitian.

Pada tahap observasi awal, peneliti melakukan wawancara penjajakan kepada 5 orang informan yang memenuhi kriteria awal. Namun, berdasarkan hasil analisis data seketika, ditemukan adanya pola jawaban yang sama, berulang, dan tidak lagi memunculkan informasi atau tema baru (jenuh). Menimbang prinsip efisiensi dan kedalaman data kualitatif, peneliti memutuskan untuk melakukan pembatasan fokus. Selanjutnya, penelitian dilanjutkan secara mendalam (*in-depth*) dengan menetapkan 2 (dua) orang informan utama yang dinilai paling representatif, menguasai masalah, dan mampu memberikan informasi yang paling kaya (*rich information*) terkait fenomena yang diteliti.

Pengambilan data dilakukan melalui tiga proses. Pertama, wawancara, yakni mengajukan beberapa pertanyaan penelitian kepada informan untuk mendapatkan data primer. Kedua, observasi lapangan, yakni mendatangi langsung lokasi kerja informan untuk mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan. Ketiga, studi pustaka, yakni menggali informasi lebih dalam melalui jurnal, buku, dan laporan penelitian lain yang relevan untuk menyempurnakan penelitian ini. Pengambilan data dari berbagai sumber ini dilakukan untuk saling melengkapi dan mengonfirmasi temuan antara satu sumber dan sumber lainnya.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu aktivitas analisis data yang berlangsung terus-menerus dan dilakukan secara interaktif hingga data mengalami kejenuhan. Model ini memiliki tiga tahapan: (1) reduksi data, yaitu proses memilih,

memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data yang muncul dalam catatan lapangan atau transkripsi wawancara; (2) penyajian data, yaitu menyajikan kumpulan informasi yang teratur dan terkompresi sehingga dapat dijadikan acuan untuk pengambilan kesimpulan dan tindakan; dan (3) penarikan kesimpulan, yaitu mencatat keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, arus kausal, dan proposisi yang muncul dari data.

Keabsahan data pada penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan jawaban antarinforman, serta triangulasi teknik, yaitu mencocokkan hasil wawancara dengan hasil observasi lapangan dan temuan studi pustaka. Data lapangan dikumpulkan pada Maret–April 2025 melalui wawancara bertahap dengan kedua informan, sebagaimana tercantum pada penanggalan setiap kutipan di bagian hasil penelitian; naskah ini kemudian disusun ulang dan dimutakhirkan konteks keputusannya pada 2025 untuk kepentingan publikasi.

4. PEMBAHASAN

4.1 Mengganggu (Asumsi) yang Lumrah (*Disrupting the Commonplace*)

Disrupting the commonplace berdasarkan pendekatan literasi kritis memposisikan informan sebagai individu yang memiliki asumsi. Informan memiliki asumsi sebagai landasan untuk merespons informasi yang diterima. Asumsi dapat terbentuk dari pengalaman hidup masing-masing individu. Usaha untuk *disrupting the commonplace* adalah selalu mempertanyakan kebenaran informasi dari lensa yang berbeda. Hal ini dilakukan informan dengan mempermasalahkan informasi yang dibaca. Mempermasalahkan informasi yang dimaksud adalah mencoba melihat informasi dari sisi lain yang bertentangan dengan informasi yang disampaikan.

“Sering sekali saya mempermasalahkan informasi yang saya baca, saya akan mempertanyakan itu... (P, Informan 1, 5 April 2025).”

Pustakawan mencoba untuk mempermasalahkan informasi yang dibaca karena menyadari bahwa setiap informasi memiliki tujuan. Tujuan yang diselipkan dapat menggiring opini informan saat membaca informasi. Proses memahami maksud dan tujuan dari informasi salah satunya dilakukan dengan mencoba untuk memposisikan diri sebagai penulis. Penulis yang dimaksud tidak selalu berkaitan dengan individu, bisa juga media sebagai pengendali informasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan, bahwa memahami tujuan informasi dapat dilakukan dengan melihat latar belakang media yang membagikan informasi.

“Kalau dari aku sih lebih ke pertama ke media yang menginformasikan, ...jadi kalo dia medianya pemerintah yaudah, saya mencoba memposisikan yaudah yang menulis ini mungkin yang memiliki maksud tersendiri gitu, tapi kalau untuk tulisan dalam bentuk sosial, bentuk umum, itu kadang aku agak lebih terima lebih mudah sih gitu (P, Informan 1, 17 Maret 2025).”

Pustakawan memiliki kecenderungan yang beragam dalam proses mencari informasi. Setiap individu memiliki alasannya tersendiri dalam hal pemilihan informasi sebagai rujukan, tetapi semua informan dalam penelitian ini setuju bahwa setiap informasi yang diproduksi pasti memiliki tujuan. Tujuan dari dibuatnya informasi tergantung pada posisi penulis pada saat dibuatnya sebuah informasi.

Setiap informasi yang dibuat tentu memiliki tujuannya sendiri, sehingga perlu untuk mempertanyakan tujuan diciptakannya sebuah informasi oleh penulis. Penulis atau media yang mengakui bahwa dirinya adalah pihak yang netral sekalipun, pasti memiliki tujuan untuk mengakui bahwa dirinya netral. Begitu pun informasi yang dituliskan atau dipublikasikan, tentu memiliki tujuan mengapa informasi tersebut dibuat sebagai informasi yang tidak berpihak. Hal ini telah disadari oleh para informan bahwa setiap informasi, dalam bentuk apa pun, pasti memiliki tujuan.

“Setiap kali menyerap sebuah informasi, saya pasti berpikir informasi dibuat untuk tujuan tertentu. Sekalipun yang netral. Contoh

simpelnya, informasi tentang tutorial sesuatu pasti dibuat karena penulis atau pembuat informasi memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat soal cara melakukan sesuatu yang menurutnya penting... (Q, Informan 2, 6 April 2025)."

Informasi dengan beragam tujuan seringkali menciptakan isi yang beragam. Tidak semua informasi menyajikan isi sebagaimana harapan atau ekspektasi pembaca. Individu dengan kemampuan literasi kritis akan berusaha untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai informasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk untuk menilai informasi dengan lensa baru. Informan cenderung untuk mendalami informasi yang tidak sesuai ekspektasi ketika mereka merasa tertarik dengan informasi yang disampaikan atau yang berhubungan dengan profesi informan.

"Yang pertama saya akan mencoba mencari referensi lain kayak gitu, ...apakah benar informasi yang saya dapatkan itu sesuai dengan yang dibicarakan, kalau ngomongin sesuai dengan fakta, kadang kan aku tidak pada lokasi tersebut, jadi ee belum bisa disebut fakta juga sih, jadi lebih mencari apa yang dibicarakan oleh banyak orang (P, Informan 1, 17 Maret 2025)."

Selain mencari informasi pembandingan, informan juga melakukan pemeriksaan ulang pada informasi yang dianggap berbeda atau di luar ekspektasi. Informan melakukan hal tersebut untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan penyampaian informasi. Informasi tersebut kemudian dibandingkan dengan asumsi awal informan.

"Jika mendapatkan informasi di luar ekspektasi ya kaget, like 'Oh wow ternyata gitu ya', lalu reaksi selanjutnya adalah 'Masa gitu?' lalu kroscek lagi validitas informasi untuk menentukan faktor apa yang membedakan informasi yang saya ketahui dengan informasi yang baru didapat (Q, Informan 2, 18 Maret 2025)."

Mencari lebih banyak informasi dan memahami pemikiran penulis mengenai situasi yang terjadi dapat memberikan cara pandang baru terhadap sebuah situasi yang sebelumnya

tidak diketahui. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan literasi kritis seseorang, karena literasi kritis berusaha untuk mengeluarkan individu dari ideologi tertentu untuk dapat memberikan kebebasan berpikir. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, informan mendapatkan kebebasan berpikirnya dengan cara mencari lebih banyak informasi yang kemudian dibandingkan dengan asumsi awal, sebuah pola yang konsisten dengan konsepsi *disrupting the commonplace* sebagai upaya melihat hal yang "keseharian" melalui lensa baru (Lewison, Flint, & Sluys, 2002).

4.2 Memeriksa Berbagai Sudut Pandang (Interrogating Multiple Viewpoints)

Memeriksa berbagai sudut pandang menurut literasi kritis adalah untuk mengetahui suara siapa yang didengar dan suara siapa yang hilang. Terkadang, tidak semua informasi dapat menyampaikan keseluruhan situasi yang sedang terjadi. Hal ini dapat terjadi karena adanya keterbatasan informasi yang tidak diketahui oleh penulis informasi, ataupun karena adanya unsur ketersengajaan. Unsur ketersengajaan tersebut terjadi karena adanya keberpihakan penulis pada kelompok atau pihak tertentu.

Penulis menginformasikan sesuatu kepada para pembaca menggunakan sudut pandang tertentu, menyesuaikan latar belakang dan kepentingan penulis. Terdapat kemungkinan bahwa sudut pandang penulis belum tentu dapat mewakili keseluruhan pihak yang berkaitan dengan apa yang diinformasikan. Maka dari itu, dibutuhkan usaha untuk menjajarkan dan membandingkan informasi dari beragam sudut pandang. Memeriksa berbagai sudut pandang dilakukan untuk memahami suatu konteks atau permasalahan berdasarkan sudut pandang orang lain, serta melihat pihak mana yang mendominasi dan yang termarginalkan dalam suatu informasi.

Menanggapi ketidaknetralan dalam informasi, informan merasa hal tersebut adalah wajar mengingat setiap individu memiliki proses berpikir yang berbeda untuk merespons sebuah situasi atau kejadian tertentu. Informasi tidak pernah terlepas dari kondisi atau situasi yang berhubungan dengan suatu kejadian.

Cara individu menginformasikan situasi tergantung pada posisi sosial individu pada saat kondisi tersebut terjadi. Posisi sosial individu dapat mendorong terjadinya ketidaknetralan dalam menginformasikan sesuatu. Hal yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana menyikapi informasi agar pembaca mendapatkan manfaat dan tidak terlibat dalam permasalahan sosial yang terdapat dalam informasi.

"Ya gak gimana gimana, karena setiap orang bebas berpendapat (Q, Informan 2, 18 Maret 2025)."

Menanggapi informasi yang tidak netral atau berpihak pada kelompok tertentu, para informan tetap mengonsumsinya. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui situasi dari sudut pandang yang belum diketahui sebelumnya. Informasi yang tidak netral bukan berarti informasi yang salah, tetapi dapat menyebabkan individu terjebak pada pemahaman tunggal. Pemahaman tunggal dapat menyebabkan individu menjadi kurang bijak dalam menerima ataupun merespons informasi. Informan perlu menjajarkan dan melihat kontradiksi informasi yang disampaikan oleh penulis ataupun media penyedia informasi yang beragam. Hal tersebut dilakukan oleh informan dengan lebih banyak membaca informasi dari berbagai pihak, bukan hanya pihak yang terkait secara langsung, melainkan juga pihak ketiga sebagai penilai.

"Mungkin yang pertama aku melihat medianya, yang dimaksud media itu media perusahaannya, terus kemudian penulisnya, jika penulisnya saya kenal, itu kira-kira pikirannya lebih ke pihak mana gitu, yang ketiga mungkin dari masyarakat ya, jadi pembicaraan dari masyarakat seperti apa (P, Informan 1, 17 Maret 2025)."

Ketidaknetralan sebuah informasi dapat diidentifikasi dengan melihat cara penulis dalam menarasikan situasi. Situasi dapat berhubungan dengan tempat hingga posisi individu ataupun kelompok tertentu. Salah satu cara informan untuk mengidentifikasi ketidaknetralan informasi, yakni dengan melihat pihak mana yang diuntungkan maupun dirugikan dengan adanya sebuah informasi,

terlebih ketika informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan realita atau pengetahuan informan akan pihak terkait.

"Biasanya sih ini larinya ke informasi politik ya, informasi politik atau perebutan kekuasaan itu akan memuji satu yang dijunjung, menghujat lawannya seperti itu. Atau kalau lebih ke sosial itu biasanya lebih ke isu-isu yang lebih sensitif, seperti kadang isu agama kayak gitu... (P, Informan 1, 17 Maret 2025)."

Cara informan dalam memeriksa informasi dari berbagai sudut pandang adalah dengan mencari informasi dari berbagai pihak, seperti pihak yang terkait langsung dan pihak ketiga yang menilai informasi. Informan memandang informasi yang mengandung ketidaknetralan atau keberpihakan akan cenderung mendukung pihak tertentu. Penulis menarasikan informasi dengan memuji pihak tertentu yang didukungnya. Informasi yang mengandung ketidaknetralan atau keberpihakan terhadap kelompok tertentu cenderung berada pada informasi politik dan sosial yang sifatnya sensitif. Hal ini sesuai dengan dimensi berikutnya pada literasi kritis, yakni fokus pada isu sosial-politik.

4.3 Fokus pada Isu Sosial-Politik (*Focusing on Sociopolitical Issues*)

Jenis informasi yang menjadi fokus dalam pendekatan literasi kritis adalah isu sosial-politik. Hal ini karena isu sosial-politik dinilai sebagai salah satu akar ketidakadilan sosial dalam sebuah informasi. Cara informan dalam membedakan informasi yang mengandung unsur isu sosial-politik adalah dengan melihat siapa yang menulis dan siapa yang diuntungkan dengan adanya informasi tersebut.

"Yang pertama, yang dituliskan itu siapa, siapa yang menulis, siapa media yang menulis, kemudian kira-kira tulisannya itu e menguntungkan siapa... (P, Informan 1, 17 Maret 2025)."

Informasi adalah netral, tetapi dalam proses pembuatannya biasanya dibangun secara sosial dan politik untuk mencapai agenda tertentu, terlebih lagi pada isu sosial-politik yang memang pada dasarnya dibuat

dengan kepentingan pihak tertentu. Memahami informasi sosial-politik tidak semudah yang dibayangkan, karena selalu berhubungan dengan pihak yang berkuasa dan agenda sosial-politik. Informasi sosial-politik cenderung berisi kalimat persuasi untuk memengaruhi pembaca sehingga dapat mencapai agenda yang ditentukan. Meskipun demikian, informan pada penelitian ini tetap memilih untuk terus mengonsumsi informasi sosial-politik sebagai asupan intelektual pribadi dan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan.

"Ya aku tetep aku baca sih, selama itu untuk konsumsi pribadi aja, jadi lebih pengaruhnya ke keputusan pribadi... (P, Informan 1, 17 Maret 2025)."

Proses memahami isu sosial-politik yang dilakukan informan cenderung berhati-hati. Informan berusaha untuk tidak serta-merta percaya pada isu sosial-politik, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan ulang lebih lanjut. Memahami lebih lanjut isu sosial-politik dapat dilakukan dengan mengamati kondisi nyata atau realita yang ada dan siapa yang membuat informasi, hal ini mengarah pada relasi yang terbentuk pada individu ataupun media publikasi yang memiliki kontrol atas informasi tersebut.

"Jangan mudah percaya dengan informasi yang berkaitan dengan isu sosial politik. Namanya juga isu, masih butuh kroscek lebih lanjut. Butuh dilihat bagaimana kondisi sebenarnya dan siapa pembuat informasi (Q, Informan 2, 18 Maret 2025)."

Cara informan dalam memahami sebuah kekuasaan yang disisipkan dalam isu sosial-politik adalah dengan melihat penulis dan media yang mempublikasikan informasi. Relasi dan keberpihakan penulis memengaruhi cara penulis dalam menuliskan informasi, dan hal ini tidak menutup kemungkinan juga berlaku pada media penyedia informasi. Media penyedia informasi satu dan yang lainnya dapat menyajikan data yang berbeda, sesuai dengan pihak mana yang didukung dan memiliki kuasa terhadap media tersebut.

"...media dan siapa yang menulis, nama penulisnya, nama media atau perusahaan yang

menuliskan informasi tersebut (P, Informan 1, 17 Maret 2025)."

"Dengan melihat latar belakang penyampai informasi dan isi informasi. Contohnya ketika pemilu yang lalu terjadi persaingan antara Jokowi dengan Prabowo. Berita-berita yang disajikan oleh MetroTV dan TVOne terlihat berbeda perspektif. Perspektif itu tergantung siapa pemilik modal MetroTV dan TVOne serta di pihak mana mereka berpihak. Relasi kuasa pada informasi akan terlihat jelas ketika melihat siapa pemilik modal stasiun TV itu (Q, Informan 2, 6 April 2025)."

Cara informan dalam meyakini bahwa dalam informasi tersebut mengandung kekuasaan dari pihak tertentu adalah dengan melihat kecenderungan yang muncul dalam informasi. Kecenderungan yang dimaksudkan adalah kalimat yang ditampilkan dalam informasi akan lebih memihak kelompoknya atau memberikan kesan positif pada pihak yang didukung. Informasi yang memihak kelompok tertentu akan berusaha menggiring opini pembaca untuk mendukung agenda dari pihak tertentu.

"...Jika isinya berusaha menggiring opini, jelas ada relasi kuasa di situ. Kebanyakan informasi yang menggiring opini ada di isu sosial politik (P, Informan 1, 17 Maret 2025)."

Keberpihakan penulis dan relasi kuasa yang terselip dalam informasi merupakan hal yang lumrah terjadi, terlebih lagi saat berhubungan dengan isu sosial-politik. Hal ini karena menulis merupakan sebuah profesi: penulis menginformasikan sesuatu tergantung pada siapa yang membayarnya, sehingga akan sangat kecil kemungkinan untuk menghindari ketidaknetralan informasi. Penulis terikat pada posisi sosial tertentu yang membatasi cara menyampaikan informasi.

"...kadang tuh aku melihat penulis itu sebuah pekerjaan, jadi penulis itu bagaimana pun mencari kapital, mencari uanglah gitu, jika kamu menulis sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diminta perusahaan apakah mungkin bisa (P, Informan 1, 5 April 2025)."

Berdasarkan pemaparan di atas, fokus pada isu sosial-politik dianggap bermanfaat

sebagai asupan intelektual pribadi. Tetapi, memahami isu sosial-politik tidak mudah; diperlukan kewaspadaan karena sifatnya yang persuasif. Isu sosial-politik berusaha mendorong opini pembacanya untuk mendukung agenda pihak yang bersangkutan. Hal ini membuat informan harus selalu merasa curiga dengan apa yang disampaikan dalam informasi yang mengandung isu sosial-politik. Sebuah kewaspadaan yang relevansinya semakin meningkat di tengah maraknya konten sintetis dan disinformasi berbasis kecerdasan buatan generatif yang sulit dibedakan dari informasi yang diverifikasi (Tewell, 2025).

4.4 Mengambil Tindakan (*Taking Action*)

Mengambil tindakan dalam literasi kritis menunjukkan bagaimana cara pembaca menindaklanjuti informasi yang diperoleh. Tahap awal sebelum melakukan tindakan, informan melakukan akumulasi informasi yang telah dimiliki untuk mendapatkan inti dari pembahasan. Akumulasi informasi dapat berupa kumpulan informasi yang dibaca, ataupun informasi yang diperoleh melalui pengalaman sosial. Saat akumulasi informasi yang dimiliki dirasa belum mencukupi, informan akan mencoba mengaitkannya dengan teori yang telah dipelajari untuk membantu memahami informasi yang sedang dibaca, baik berupa teori informasi dan perpustakaan yang dipelajari dalam kelas, maupun teori sosial lainnya.

“Isi informasinya dikaitkan dengan informasi yang sudah lebih dulu dimiliki oleh otakku (Q, Informan 2, 18 Maret 2025).”

Melihat inti pembahasan suatu informasi juga dilakukan dengan melihat dinamika opini publik dalam menanggapi informasi tersebut, yang dapat diamati melalui media sosial yang diakses oleh informan. Seringkali opini mayoritas dijadikan sebagai kesimpulan yang diperoleh, meski opini mayoritas mengandung banyak pembelaan dan tidak selalu dapat dijadikan sebagai realitas sosial yang terjadi. Kesimpulan yang diperoleh diposisikan sebagai hipotesis yang dapat dikritik dan terus direvisi seiring berjalannya waktu. Hal ini karena informasi pada saat ini berada dalam fase *post-truth*, di mana fakta tidak terlalu

berpengaruh terhadap pembentukan opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal. Informasi saat ini dapat diproduksi secara bebas tanpa harus melewati tahap verifikasi ataupun uji kebenaran; setiap individu yang memiliki media, termasuk melalui alat kecerdasan buatan generatif, dapat menciptakan informasinya sendiri berdasarkan keyakinan dan sudut pandang yang dimiliki.

“Untuk yang pertama ya, pertama faktor pengetahuan pribadi, yang kedua pendapat-pendapat dari masyarakat di medsos, walaupun aku tetap pegang bahwa belum tentu pendapat mayoritas orang itu benar (P, Informan 1, 17 Maret 2025).”

Informan yang telah menentukan inti pembahasan dari informasi yang diterima kemudian menindaklanjuti informasi dengan melakukan refleksi, yaitu kesadaran diri dalam menilai kondisi yang sedang terjadi. Refleksi yang dilakukan adalah mencari solusi alternatif menggunakan pengetahuan yang telah terbentuk dalam diri informan. Di sisi lain, informan juga melakukan diskusi dengan orang terdekat untuk mendapatkan solusi alternatif dari informasi yang diterima. Diskusi atau berbagi pikiran dengan orang lain dapat membantu informan untuk memahami informasi dari sudut pandang lain yang belum terpikirkan sebelumnya.

“Ya mungkin memikirkannya, kemudian sih seringnya diskusi sama yang dekat, seperti istri, kadang kalau diskusinya sama istri jadi rada berantem juga, atau diskusi sama teman (P, Informan 1, 17 Maret 2025).”

Tindakan dilakukan sebagai hasil dari proses tiga dimensi sebelumnya. Informan melakukan tindakan ketika terdapat sebuah masalah dalam informasi yang diperoleh, yaitu ketidaknetralan ataupun keberpihakan dalam informasi. Tindakan diambil sebagai upaya membebaskan diri dari pemahaman tunggal atau logosentris suatu informasi. Informan akan berbagi opini dengan orang terdekat sebagai tindakan setelah mendapatkan sebuah informasi, dengan tujuan untuk mengetahui kecenderungan cara berpikir orang-orang di sekitarnya, sehingga informan dapat

menentukan posisi ketika sedang bersosialisasi.

"Ya mungkin memikirkannya, kemudian sih seringnya diskusi sama yang dekat, ...Ya buat bertukar pikiran aja, dari pada kalau membaca informasi cuma dipikirkan sendiri, bisa juga untuk mengetahui sudut pandang orang lain jadi aku bisa memposisikan diri, biar aman (P, Informan 1, 5 April 2025)."

Informan pada penelitian ini memiliki beragam tindakan untuk menindaklanjuti informasi yang diperoleh, mulai dari tidak mengambil tindakan sama sekali hingga berbagi opini secara aktif dengan orang lain.

4.5 Sintesis: Literasi Kritis sebagai Praksis Reflektif Pustakawan

Keempat dimensi di atas menunjukkan bahwa literasi kritis pada informan penelitian ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan membentuk satu siklus reflektif: kecurigaan awal terhadap informasi (*disrupting the commonplace*) mendorong pencarian sudut pandang pembanding (*interrogating multiple viewpoints*), yang kemudian paling tajam diterapkan ketika informasi tersebut menyentuh ranah kekuasaan dan kepentingan kelompok (*focusing on sociopolitical issues*), dan pada akhirnya diarahkan pada tindak lanjut sosial berupa diskusi maupun penyebaran ulang pemahaman dalam program literasi (*taking action*). Pola ini memperkuat gagasan Lewison, Flint, & Sluys (2002) bahwa keempat dimensi tersebut saling terkait dan tidak bersifat linear-berurutan, melainkan dapat diaktifkan kembali kapan pun sebuah informasi baru mengguncang asumsi yang telah terbentuk sebelumnya.

Temuan ini juga memberi gambaran empiris bahwa pustakawan akademik di Indonesia cenderung menempatkan literasi kritis terutama sebagai kompetensi personal untuk konsumsi informasi sehari-hari, dan baru meneruskannya secara tidak langsung ke dalam program literasi melalui pemahaman yang telah mereka miliki. Pola ini konsisten dengan catatan bahwa penerapan literasi informasi kritis secara eksplisit dan terstruktur dalam kurikulum masih menghadapi tantangan

kelembagaan, termasuk risiko penolakan ketika materi bermuatan isu sosial-politik diangkat secara langsung dalam kelas literasi (Williams & Kamper, 2023). Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara kemampuan literasi kritis yang telah dimiliki pustakawan secara individual dan pelembagaan kemampuan tersebut ke dalam kurikulum atau modul literasi informasi yang eksplisit di perpustakaan perguruan tinggi.

Secara keseluruhan, temuan pada kelima subbagian di atas menggambarkan bagaimana pustakawan akademik menavigasi informasi sosial-politik di era *post-truth*: bukan melalui satu langkah tunggal, melainkan melalui siklus kecurigaan awal, verifikasi silang antarsudut pandang, kontekstualisasi relasi kekuasaan, dan tindak lanjut sosial yang saling menguatkan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bagaimana pustakawan akademik di Semarang menavigasi informasi sosial-politik di era *post-truth* melalui praktik keempat dimensi literasi kritis, meskipun dengan intensitas dan kecenderungan yang berbeda antarinforman. Informan aktif mencari informasi dari berbagai sumber referensi dengan beragam sudut pandang, meskipun ada pula kecenderungan untuk tidak mencari tahu lebih lanjut pada sebagian informasi tertentu. Informan memahami ketidaknetralan informasi dan relasi kekuasaan yang seringkali diselipkan dalam informasi, khususnya informasi yang mengandung isu sosial-politik, dan bersikap lebih waspada dalam proses memahaminya dengan mencari lebih banyak referensi sebagai usaha untuk tidak terjebak pada pemahaman tunggal yang disematkan penulis. Proses yang dilakukan informan setelah memahami informasi cenderung berupa konsumsi pribadi untuk memperkaya pengetahuan diri sendiri, yang kemudian ditindaklanjuti melalui diskusi dengan orang terdekat maupun dibagikan kembali dalam program literasi.

Dalam dunia pendidikan tinggi, pustakawan sebagai salah satu penggerak program literasi sudah seharusnya terus mengembangkan kemampuan literasi kritis

untuk menavigasi informasi, khususnya informasi sosial-politik di era *post-truth*, mengingat kompleksitas lanskap informasi yang dihadapi generasi mahasiswa saat ini semakin meningkat seiring meluasnya disinformasi dan konten hasil kecerdasan buatan generatif. Pustakawan yang kritis terhadap informasi diharapkan dapat mendukung perannya sebagai fasilitator literasi yang tidak sekadar menyalurkan informasi, tetapi juga membimbing pengguna untuk memahaminya secara reflektif dan bertanggung jawab.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adunyarittigun, D. (2017). Reconceptualizing reading instruction in EFL/ESL classrooms through critical literacy. *LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network*, 10(2), 187–197.
- Ani, J., Lumanauw, B., & Tampenawas, J. L. A. (2021). Pengaruh citra merek, promosi dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian konsumen pada e-commerce Tokopedia di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9(2), 663–674.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Jejak.
- Arvianti, I., Fitriati, S. W., & Mujiyanto, J. (2023). Critical questions in the four dimensions model of critical literacy pedagogy. *Proceedings of the International Conference on English Language Teaching and Research*, 7, 593–602.
- Djaenudin, M., & Tupan. (2020). Transformasi peran pustakawan lipi sebelum dan sesudah reorganisasi. *Visi Pustaka*, 22(3), 169–180.
- Farida, N. (2021). *Kemampuan literasi kritis mahasiswa manajemen informasi perpustakaan*. Sleman: Universitas Gadjah Mada. Diambil kembali dari <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/199475>
- Hidayat, R. A., Gustine, G. G., & Setyani, S. (2020). Critical literacy strategy and challenges: Voice from a high school EFL teacher. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 20(3), 315–324.
doi:<https://doi.org/10.17509/jpp.v20i3.25399>
- Indriani, N. (2020). *Perpusnas dorong perpustakaan gunakan paradigma kebermanfaatan*. Jakarta: ANTARA News. Diambil kembali dari <https://www.antaraneews.com/berita/1922920/perpusnas-dorong-perpustakaan-gunakan-paradigma-kebermanfaatan>
- Kuo, J. M. (2023). Developing gender awareness through critical literacy and picture book. *Journal of English Language and Literature Studies*, 17(2), 29–55.
- Lee, C. G. (2019). Two plus four dimensions of critical literacy. *Educational Philosophy and Theory*, 52(1), 79–87.
<https://doi.org/10.1080/00131857.2019.1605898>
- Lewison, M., Flint, A. S., & Sluys, K. V. (2002). Taking on critical literacy: The journey of newcomers and novices. *Language Arts*, 79(5), 382–392.
- Liu, Y. (2017). Critical literacy practices in EFL reading classroom: An experimental study towards Chinese university students. *English Language Teaching*, 10(5), 133–141.
doi:<https://doi.org/10.5539/elt.v10n5p133>
- Reece, B., & Rish, R. (2020). A critical literacy approach to student affairs education. *Journal of Critical Scholarship on Higher Education and Student Affairs*, 5(3).
- Reece, B., & Rish, R. (2020). A critical literacy approach to student affairs education. *Journal of Critical Scholarship on Higher Education and Student Affairs*, 5(3).
- Royani, Y. dan Rahayu, R. N. (2020). Transformasi peran pustakawan di lembaga penelitian dan akademik. *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, 29(2), 73–79.
- Sistarina, A. (2020). Implementasi literasi informasi sebagai upaya Perpustakaan Universitas Airlangga mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi. *JPUA: Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga*, 10(2), 104–115.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tewell, E. (2025). Two decades of critical information literacy: A review and analysis of the literature. *Information Research an international electronic journal* 30(CoLIS) (hal. 443–460). Glasgow: University of Strathclyde.
doi:DOI:10.47989/ir30CoLIS52267
- Thevenin, B. (2022). *Making media matter: Critical literacy, popular culture, and creative production*. New York: Routledge.
- Utomo, T. P., & Asaniyah, N. (2025). Desain model knowledge brokering di perpustakaan akademik: Sintesis praktik Perpustakaan UII dan kajian pustaka. *Prosiding Seminar Nasional dan Munas FPPTMA 2025* (hlm. 171–184). FPPTMA.
- Weng, T. H. (2023). Creating critical literacy praxis: Bridging the gap between theory and practice. *RELC Journal*, 54(1), 197–207.

doi:<https://doi.org/10.1177/0033688220982665>

- Wickline, M. A. (2017). Critical literacy for information professionals. . *Journal of the Medical Library Association*, 105(1), 115–116.
doi:<https://doi.org/10.5195/jmla.2017.115>
- Williams, S., & Kamper, E. (2023). Critical information literacy at the crossroads: An examination of pushback from implementation to praxis. *Journal of Information Literacy*, 17(1), 232–243.
doi:<https://doi.org/10.11645/17.1.3397>
- Zhang, C., Wang, B., Ye, S., & Khamo, D. (2025). Proposing a critical AI literacy framework for academic librarians: A case study of a database-anchored GenAI tool for Chinese studies. *International Journal of Librarianship*, 10(2), 34–47.
doi:<https://doi.org/10.23974/ijol.2025.vol10.2.431>